ANALISIS EKONOMI SYARIAH ATAS LEGALITAS HUTANG PIUTANG BERSYARAT DALAM TRANSAKSI MODERN

Ulpariyeh

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam

ulpariyeh@dosen.steiabdussalam.ac.id

Laila Qomariyah

Institut Sayyid Muhammad Alawi al Maliki

Lailaqamariyah15@gmail.com

ABSTRAK

Praktik hutang piutang bersyarat merupakan fenomena umum dalam masyarakat, terutama di kalangan para nelayan yang memerlukan modal untuk kegiatan berlayar. Di Desa Gulbung, kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang madura, praktik ini berlangsung dengan syarat hasil tangkapan ikannya harus di jual kepada pengepul ikan tersebut atau yang memberi pinjaman selama hutang tersebut belum lunas. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi empiris atau field reseacrh dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara sebagai data primer dan data sekunder diperoleh dari literatur referensi lainnya berupa buku dan kitab yang berkaitan. Sedangkam untuk analisis datanya menggunakan metode Miles dan Huberman dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang piutang bersyarat di Desa Gulbung ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, meskipun kedua belah pihak sepakat dan ridha terhadap syarat tersebut, praktik ini mengandung unsur riba, yaitu dengan adanya syarat tambahan dan pengembalian hutang tersebut tidak di ketahui kapan akan di lunasi, oleh karena itu praktik tersebut tidak sesuai dengan syarat sah nya akad qardh menurut hukum islam, karena terdapat unsur riba di dalamnya. Disarankan agar masyarakat lebih memahami prinsip-prinsip akad dalam islam agar menghindari praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau adanya kerugian bagi salah satu pihak.

Kata Kunci : Hutang piutang (al-qardh), hukum islam

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial Masyarakat terdapat hubungan saling membutuhkan yang tak terelakkan terkait dengan kebutuhan tiap individu yang berbeda-beda. Tolong menolong adalah ciri khas Masyarakat yang hidup dengan kepedulian antar sesama yang cenderung tinggi. Kebutuhan yang tak tercukupi dan berkekurangan juga kehidupan yang tercukupi serta berlebihan semakin mendorong adanya kebutuhan satu sama lain. Layaknya kehidupan Masyarakat di Indonesia dengan sikap sosial yang memenuhi keseharian. Adanya Masyarakat dengan strata ekonomi yang rendah dan strata ekonomi yang tinggi juga menyebabkan hubungan sosial untuk saling membutuhkan. Sehingga Masyarakat dengan strata ekonomi yang rendah cenderung meminta bantuan terhadap Masyarakat dengan ekonomi tinggi. Sebagaimana yang terjadi di kalangan Masyarakat Indonesia maraknya Masyarakat yang melakukan pinjaman baik kepada perorangan atau bahkan kepada perbankan, sebagai salah satu cara untuk melanjutkan kehidupan dan menstabilkan keuangan. Transaksi hutang piutang yang dilakukan Masyarakat juga beragam macamnya, seperti pinjaman untuk modal usaha, atau bahkan pinjaman untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pinjaman dalam jumlah yang sangat kecil atau pinjaman dengan limit yang besar. Kalangan ekonomi rendah, sedang, dan tinggi banyak terlibat dalam transaksi tersebut. Sehingga hutang piutang menjadi sangat umum terdengar di Masyarakat.

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah *shar'i* yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan *fuqoha'* (ahli fiqih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah, selalu berdasarkan ketetapanannya dengan satu prinsip pokok bahwa "segala sesuatu asalnya *mubah* (boleh).¹ Dalam perekonomian, hutang berfungsi untuk mengurangi kendala pendapatan dari pengeluaran individu. Hutang memotivasi perekonomian untuk tumbuh karena memungkinkan bisnis untuk berinvestasi dan individu untuk meningkatkan tingkat konsumsi tanpa

¹ Syakir sula, *asuransi syariahlife and general* (Jakarta: Gema Insani press,2004), I .

pendapatan yang memadai di tangan mereka saat ini. Pembiayaan dapat juga mengefisienkan alokasi modal dan secara teoritis berbagi resiko dan mengalikannya kepada orang-orang yang mampu menerimanya.

Indonesia merupakan negara dengan Masyarakat muslim yang mendominasi. Masyarakat muslim Indonesia tidak hanya berpegang kepada hukum negara namun juga hukum syariah merupakan pedoman Masyarakat Indonesia dalam melakukan hubungan antar manusia. Begitu pun dalam melakukan transaksi seperti hutang piutang Masyarakat muslim Indonesia harus berpegang terhadap konsep syariah yang ada.

Secara umum hutang piutang adalah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkatan Masyarakat tradisonal maupun modern, oleh sebab itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai proses awal yaitu akad. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan kerelaan masing-masing.² Dalam kehidupan Masyarakat banyak di lakukan transaksi hutang piutang dengan syarat-syarat tertentu. Seseorang memberi hutang kepada orang lain dengan memakai syarat. syarat-syarat ini dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian hutang piutang agar bernilai ibadah kepada tuhan dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berhutang.³ Keadaan ekonomi Masyarakat disesa ini pun tidak sama rata. Bagi Masyarakat yang merupakan ekonomi strata tinggi umumnya menjadi juragan ikan atau pemilik perahu sebagai alat untuk mencari ikan. Dan Masyarakat yang memiliki strata ekonomi yang rendah umumnya menjadi pencari ikan juragan tersebut. Para pencari ikan yang ingin semakin menaikkan ekonomi mereka dan para juragan ikan yang juga terus berusaha menstabilkan keuangan mereka, sehingga memunculkan sebuah transaksi yaitu hutang piutang yang bersyarat. Dalam transaksi ini nelayan meminjam uang untuk membuat perahu sendiri agar tidak

² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37

³ abu Sura'i & Abdul Hadi, *Bunga bank Dalam Islam*, (Surabaya: al-ikhlas, 1993), 131

lagi bekerja kepada juragan ikan dengan bisnisnya sendiri. juragan ikan sebagai pemilik modal atau uang memberikan persyaratan kepada nelayan tersebut agar menjual hasil pencariannya hanya kepada juragan ikan tersebut, selama hutang itu belum terbayarkan maka selama itu pula hasil laut yang diperoleh hanya boleh dijual kepada juragan ikan tersebut.⁴

Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa transaksi yang hutang piutang yang dilakukan oleh Masyarakat desa Gulbung merupakan transaksi hutang piutang bersyarat yang sebelumnya masih terdengar baru di kalangan Masyarakat. Dalam akad hutang piutang ada beberapa syarat yang harus terpenuhi seperti barang yang di hutangkan di syaratkan berbentuk barang yang dapat di ukur atau di ketahui jumlah atau nilainya. Hal tersebut di karenakan agar di saat waktu pengembalian atau pembayarannya tidak ada kesulitan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang di terima. dalam perjanjian hutang piutang apabila di tetapkan waktu dan tempo pelunasan hutang, maka pihak yang memberi pinjaman atau hutang tidak memiliki hak menuntut pelunasan sebelum jatuhnya tempo.⁵

Para fuqoha' telah sepakat bahwa perjanjian hutang piutang tidak boleh di kaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang mengutang misalnya persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat, apapun bentuknya atau tambahan, hukumnya haram.⁶

Transaksi hutang piutang bersyarat yang terjadi di desa Gulbung perlu diteliti karena adanya ketidaksesuaian hukum syariah didalamnya. Diantaranya yaitu karena dalam transaksi tersebut terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan, karena dalam transaksi tersebut tidak jelas kapan hutang akan dilunasi, juga terdapat unsur riba yang terkandung karena persyaratan yang diberikan oleh juragan ikan tersebut karena nelayan harus menjual ikan kepada juragan ikan tersebut diluar jumlah pinjaman pokok nelayan, adanya ketidakadilan yakni

⁴ Sa'diyah, *Wawancara*, Gulbung Pengarengan, 6 Juli 2024

⁵ H. Chairuman pasaribu & K. Suharawardi Lubis , *hukum perjanjian dalam islam* (jakarta: Sinar grafika, 1994),137

⁶ Gufron A. Mas'adi , *fiqih muamalah* ,(Rajagrafindo persada 2002)173

posisi nelayan menjadi lemah dan menerima persyaratan tersebut karena kebutuhannya terhadap uang tersebut, dalam hal ini juga ketidakadilan yang dirasakan nelayan adalah harga jual ikan tersebut menjadi tidak stabil karena harga yang diberikan oleh juragan ikan, juga akibat yang terjadi adalah nelayan merasakan keterbatasan pilihan karena hanya boleh dijual kepada juragan ikan tersebut, sehingga seakan-akan praktik ini menjadi monopoli yang menghambat persaingan pasar yang sehat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengkaji ketetapan hukum yang sedang berlaku di lingkungan masyarakat, hal ini dilakukan bermaksud untuk memahami serta menemukan fakta dan data yang dibutuhkan oleh suatu penelitian.⁷ Penelitian ini masuk ke dalam penelitian empiris, karena untuk mengetahui kemaslahatan secara langsung terhadap transaksi hutang piutang bersyarat di desa Gulbung kecamatan pengarengan.

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni data yang dikumpulkan berupa data verbal dan dipaparkan secara detail untuk menggambarkan masalah secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, situasi dan kejadian pada suatu daeran tertentu.⁸ Kualitatif juga berarti penelitian yang berusaha mengungkap sesuatu keadaan yang bersifat alamiah secara *holistic* (menyeluruh). Metode kualitatif didasari dengan pertimbangan bahwa metode ini menghasilkan data baru berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari informan.⁹

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang penting. peneliti memiliki kedudukan sebagai pengamat partisipan, serta peneliti melakukan penggalan informasi dan data ke lokasi penelitian yaitu di Desa

⁷ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), 126

⁸ Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 75-76

⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 11

Gulbung supaya mendapatkan dan memperoleh data yang sesuai dan akurat dengan yang diinginkan

C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Hutang Piutang Bersyarat Dalam Hukum Islam

Adanya kesenjangan perekonomian dalam Masyarakat dapat menimbulkan problem ekonomi sehingga membuat Masyarakat mencari jalan keluar dengan beragam hutang – piutang, salah satunya di Desa Gulbung.

Praktik hutang piutang bersyarat yang terjadi antara pengepul ikan dan nelayan pada umumnya di Desa Gulbung dengan cara tidak umum di Masyarakat. Desa Gulbung merupakan salah satu daerah yang terletak di kabupaten Sampang Madura merupakan salah satu kecamatan yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan.

Di Desa Gulbung banyak terjadi ikatan hutang piutang antara pengepul ikan dan nelayan. Dimana seorang nelayan yang tidak memiliki modal atau peralatan untuk berlayar termasuk perahu dan lain-lain nya terpaksa mengambil pinjaman uang kepada pengepul ikan demi mencari nafkah. Ketika nelayan meminjam uang sesuai yang di inginkan, dengan syarat hasil tangkapan ikannya harus di jual kepada pengepul ikan atau yang memberi hutang sampai hutangnya lunas tanpa batas waktu.

Dan yang menjadi permasalahannya adalah Dimana seorang pengepul ikan yang meminjamkan uang tersebut mengharuskan kepada nelayan yang berhutang untuk menjual hasil tangkapan ikannya dengan pemotongan harga pada umumnya. Dan telah di lakukan wawancara salah satu warga Gulbung bapak Muhammad Sukdin seorang nelayan berumur 48 tahun mengatakan bahwa dalam kejadian mereka harus merelakan harga yang tidak sesuai untuk mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan berlayar mencari nafkah kehidupan sehari-hari. Dan dikuatkan juga oleh Bapak Abrori yang mengaku bahwasanya hutang piutang bersyarat ini terpaksa beliau lakukan untuk mencari nafkah.

Sebagaimana dipaparkan oleh ibu Hj Sakdiyah sebagai pemberi pinjaman. *“sabbhen taon 2000 en osom oreng buto modal keangguy alajer begien jeregen jhuko’ bennyak se mainjem obeng keangghuy ngobengih peraoh keng ollenh lajernah koduh juel ke guleh sampek se e modalen lastereh mabelih modal sadejenh, manabi bektoh pemonah genikah bileh epon sepenteng pona sadejeh “*.¹⁰

Pernyataan di atas di benarkan oleh bapak Muhammad Sukdin sebagai peminjam dengan perkataan beliau sebagai berikut. *“engghi bhing guleh nginjem obeng sabbhen gebey modal ngobengin peraoh ghebey alajer, keng bdeh syaratah derih jregen ollenh guleh alajer koduh juel ke jregen sampek otangan guleh pona sedejeh, mon pon pona can ghuleh pon ejueleh ke serah beih “*.¹¹

Berdasarkan temuan penelitian di atas ada beberapa point penting di antaranya, praktik hutang piutang bersyarat di Desa Gulbung menunjukkan dinamika yang kompleks dan di pengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga, terlihat bahwa hutang piutang sering kali terkait dengan kebutuhan mendesak, seperti biaya Pendidikan, Kesehatan, atau kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ketergantungan pada praktik ini dapat menyebabkan siklus utang piutang yang sulit di putus, terutama di kalangan kelompok ekonomi rentan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa adanya syarat-syarat tertentu dalam perjanjian hutang, seperti bunag yang di sepakti atau pembayaran dalam bentuk barang, mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dan kepercayaan antar individu. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap konteks sosial dalam mengkaji praktik hutang piutang, serta perlunya intervensi yang tepat untuk meningkatkan literasi keuangan di Masyarakat.

¹⁰ Abrori, wawancara, Gulbung pengarengan,februari 2025

¹¹ Sukdin, wawancara, Gulbung pengarengan,februari 2025

Dalam konteks sosial Desa Gulbung, praktik hutang piutang bersyarat juga mencerminkan sodidartitas komunitas yang kuat. Banyak warga yang merasa bahwa interaksi dalam bentuk pinjam meminjam ini merupakan bagian dari tradisi dan norma sosial yang memikat mereka. Misalnya, Ketika seseorang meminjam uang dari tetangga, hubungan tersebut tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencangkup harapan untuk saling membantu di masa depan. Namun di sisi lain, ketergantungan dapat menimbulkan tekanan sosial, Dimana individu merasa terpaksa untuk memenuhi kewajiban yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Penelitian ini menemukan bahwa Sebagian besar peminjam merasa terjebak dengan siklus utang, yang dapat berujung pada masalah ekonomi yang lebih besar jika tidak di Atasi. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengedukasi Masyarakat tentang menejemen keuangan yang baik, sehingga mereka dapat membuat Keputusan yang lebih bijaksana dalam menjalani prkatik hutang piutang.

2. Tinjauan hukum islam terhadap hutang piutang bersyarat

Akad adalah Tindakan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada pihak lain. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama mengenai isi yang di inginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menyambutnya. Dengan demikaian, ijab qabul di lakukan untuk menunjukkan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Agar suatu akad di anggap sah, perlu di perhatikan rukun dan syarat yang ada. Akad antara pengepul ikan dan nelayan di anggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang di tentukan.

Dalam konteks utang piutang, banyak orang melakukan hutang piutang bersyarat, seperti yang terjadi di Desa Gulbung kecamatan pengarengan kabupaten sampang. Seperti di jelaskan sebelumnya, dalam praktiknya, pihak yang berkontribusi harus mengembalikan utangnya tanpa batas waktu, dengan adanya syarat bahwa seorang nelayan harus menjual hasil tangkapannya ke pengepul ikan atau yang memberi pinjaman. Tindakan semacam ini tidak di perbolehkan karena bertentangan dengan

ajaran islam. Transaksi atau akad utang piutang tidak boleh di sertakan dengan syarat-syarat di luar utang – piutang itu sendiri yang memberikan keuntungan kepada pihak muqrid (orang yang memberi hutang) yaitu memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.¹² syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad (muhsid) karena termasuk riba.

Mayoritas ualama' juga menganggap perbuatan ini tidak boleh karna adanya syarat yang memanfaatkan hutang piutang. Sebagaimana telah di sabdakan oleh Nabi SAW :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya : “ setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba “

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan terkemuka dari ulama' hanafiyah, yang menyatakan bahwa setiap utang piutang terkait barang yang menghasilkan keuntungan (tambahan) menjadi haram hukumnya jika di sertakan dengan syarat. Akan tetapi di bolehkan jika tidak diisyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau di ketahui adanya keuntungan pada utang piutang tersebut. Ulama' malikiyah berpendapat bahwa muqrid (pihak yang memberikan pinjaman) tidak boleh memanfaatkan harta muqtarid (pihak yang meminjam), seperti menggunakan kendaraan atau makan di rumah muqtarid, jika tujuannya adalah untuk membayar utang kepada muqrid, bukan sebagai bentuk penghormatan. Selain itu, memberikan hadiah kepada muqrid juga di larang jika di wajibkan untuk mencicil utang.¹³

Ulama syafi'iyah hanabilah melarang qard untuk hal-hal yang menghasilkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan qard dengan harapan memperoleh sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak. Sebab, qardh seharusnya di pahami sebagai akad yang di dasarkan pada kasih

¹² Mas'adi, *fiqih mu'amalah* ,173

¹³ Rahmad Syafe'i, *fiqih muamalah*, 156

sayang, kemanfaatan, atau untuk mempererat hubungan kekeluargaan.¹⁴ Namun, jika tidak ada ketentuan atau maksud untuk memperoleh yang lebih baik, maka qardh di perbolehkan. Tidak ada larangan bagi muqrid (pihak yang meminjamkan) untuk persahabatannya, karena Rasulullah SAW pernah memberikan unta yang lebih baik kepada seorang pria di bandingkan unta yang ia terima, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَضَا بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَدَنِ

Artinya : “ *Diriwayatkan dari jabir bin Abdullah r.a berkata : ketika Rasulullah SAW membayar utangnya kepadaku, beliau memberi tambahan kepadaku “*

Berdasarkan pemaparan di atas, yang dapat di pahami oleh penulis bahwasanya akad utang piutang yang terjadi di Desa Gulbung Pengarengan Sampang menurut tinjauan hukum islam belum sesuai, karena akad di dalamnya terdapat syarat tertentu yang pada akhirnya menguntungkan pihak *muqrid* itu sendiri, yaitu para muqrid memberikan syarat bahwa pihak muqrid mau memberi hutang asalkan nanti pengembalian hutang tersebut sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan syarat hasil tangkapan ikan harus di jual kepada muqrid tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat hanafiyah, yaitu setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqrid (pihak yang memberi hutang) maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad. Menurut pendapat para fuqaha, perjanjian hutang piutang tidak boleh di sertakan syarat-syarat yang tidak berhubungan langsung dengan hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid (pihak yang memberi hutang).

D. Kesimpulan

¹⁴ Syafe'i, *fiqih muamalah* , 156

Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Gulbung adanya persyaratan yang terjadi di dalam akad hutang piutang dimana seorang muqrid memberikan pinjaman kepada muqtarid dengan pemberian syarat dalam akad hutang piutang tersebut. Dimana persyaratan tersebut memberikan keuntungan sepihak bagi muqrid dan merugikan pihak muqtarid. Dan pemberlakuan syarat yang terjadi dalam akad hutang piutang berlaku sampai hutang tersebut di lunasi. akan tetapi hutang tersebut tidak memiliki batas jangka waktu atau jatuh tempo untuk melunasi hutang tersebut.

Menurut tinjauan hukum islam akad hutang piutang bersyarat antara pengepul ikan dan nelayan di Desa Gulbung kecamatan pengarengan kabupaten sampang madura secara hukum tidak sesuai dikarenakan adanya suatu persyaratan yang di berikan oleh pengepul ikan kepada nelayan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-jaziri , Abdurrahman., *Al-fiqih Ala Madzhabih , juz II*,(Rineka Cipta , Cet.4,Jakarta :2004) h.306
- Al-jizari R.A, *Al-fiqih Ala Madzhabih , juz II*,(Rineka Cipta , Cet.4,Jakarta :2004) h.342
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 11
- Asy-Syatiri, A. B. U. *Al-Yaqut An-nafis* ,h.205
- Baba, M. A., *Analisis Data Penelitaian Kualitatif*, (makassar: Aksara Timur, 2017), 104-109.
- Basyir, A. A., *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h. 56
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan 2011),Hlm. 140
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cct. ke – 1 , h. 689
- Fatah, Abdul., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Harva Kreatif , 2023), 96

- Haryoko,S. DKK, *Analisis Data penelitian kualitatif*, (Makassar : Badan Penerbit Uin Makassar,2020),122
- Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*,(jakarta:kencana 2015) hlm 20.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37
- Kholida & putra halomoan DKK,*hukum ekonomi syariah*(yogyakarta:semesta aksara) hlm 1
- Manan Abdul, *hukum ekonomi syariah* (jakarta: prenada media group 2017), h.502
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). 334
- Mas'adi, *fiqih mu'amalah* , (Rajagrafindo persada), 173
- Mas'adi,G. A., *fiqih muamalah* , (Rajagrafindo persada ,2002)173
- Mustafa Imam. *Fiqih Muamalah kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 170.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 234
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.

- Pasaribu, H.C., & Lubis, S.K., *hukum perjanjian dalam islam* (jakarta: Sinar grafika, 1994),137
- Sabiq Sayyid., *sunnah fiqih jilid 12*,(Depok : usaha kami , 1996) h. 93
- Sapto Nugroho, S., Haryani, A. T., *Metode Riset Hukum* (Surakarta: O ase Pustaka, 2020), 80-81
- Sula, M. S. *asuransi syariahlife and general* (Jakarta: Gema Insani press,2004), I.
- Sura'i abu & Hadi abdul, *Bunga bank Dalam Islam*, (Surabaya: al-ikhlas, 1993), 131
- Syafe'i Rahmat. *fiqih muamalah* ,(Sinar Baru Algensido , Bandung , 2013) h. 151
- Syafe'i, R., *fiqih muamalah*, 156
- Syarifudin A. *Garis-Garis Besar Fiqih* ,224
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Zulkifli Sunarto. *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Balai Pustaka,2010) h. 27